

DRAF ARTIKEL ILMIAH  
PENELITIAN DOSEN MUDA



KONFLIK KEPARIWISATAAN  
DI PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT  
(KAJIAN BENTUK, FUNGSI, MAKNA)

Ditulis oleh  
DRS. HASANUDDIN, M. Si

Dibiayai oleh:  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional  
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian  
Nomor: 005/SP3/PP/DP2M/II/2006  
Tanggal 1 Pebruari 2006

**FAKULTAS SASTRA/SASTRA DAERAH  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SEPTEMBER, 2006**

## DRAF ARTIKEL ILMIAH

### KONFLIK KEPARIWISATAAN DI PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT (KAJIAN BENTUK, FUNGSI, MAKNA

*Oleh Hasanuddin*

#### PENDAHULUAN

Kepariwisataan, bagi Sumatera Barat, merupakan sektor andalan pembangunan daerah di masa datang. Propinsi ini memiliki potensi yang besar bahkan untuk semua jenis pariwisata, baik alam, budaya, sejarah, bahari, pertanian, maupun religius. Hal itu sejalan dengan visi Sumatera Barat sebagai Gerbang Barat Indonesia. Visi itu akan sangat didukung oleh keberadaan bandar udara Minangkabau International Airport (MIA) yang telah diresmikan pada akhir tahun 2005 dan perluasan pelabuhan Teluk Bayur (Kompas, 15 Maret 2005).

Pilihan itu didasari oleh tuntutan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Struktur perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian (51%) namun dengan lahan budidaya yang sangat terbatas, yaitu hanya 13% dari luas daratan propinsi ini. Kondisi itu tidak tertolong karena sumberdaya alam yang dimiliki juga terbatas dan tanpa migas. Hal itu sulit untuk mengangkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Kondisi rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk terlihat pada beberapa indikator, seperti PDRB; PAD; pola konsumsi; dan tahapan kesejahteraan, seperti diperlihatkan Hasanuddin (1999, 2000). PDRB per kapita Sumatera Barat, sebelum krisis, jauh lebih rendah daripada tiga propinsi tetangganya dan bahkan lebih rendah daripada nilai rata-rata nasional (PDB per kapita), sebagaimana tabel berikut.

Komparasi PDRB/Kapita Sumbar  
Dengan Tiga Propinsi Tetangga dan PDB, 1994-1996 (Rp 000)

No	Wilayah	Dengan Migas		Tanpa Migas		
		1994	1995	1994	1995	1996
1	D.I.. Aceh	3.074,6	3.326,4	1.582,5	1.809,7	-
2	Sumatra Utara	1.989,4	2.231,4	1.951,6	2.190,3	-
3	Riau	4.884,1	5.517,7	1.897,7	2.194,4	-
4	Sumatra Barat	1.704,6	1.888,4	1.704,6	1.888,4	2.177,32
5	PDB Indonesia	2.004,6	2.334,9	1.828,8	2.148,9	2.706,28

Sumber: PDRB Propinsi-propinsi di Indonesia 1993-1995.

Program otonomi daerah dengan kembali ke basis kultural yang ideal (nagari), menjadi sinergik dengan program pengembangan kepariwisataan berbasis budaya. Otonomi daerah, di satu sisi, menuntut pembangunan sentra-sentra ekonomi baru yang tentu saja sulit diandalkan dari sumberdaya alam yang terbatas tadi. Oleh karena itu, kepariwisataan semakin disadari sebagai sektor ekonomi potensial, yang sebagaimana dibuktikan oleh Bali, mampu memberi multiple effect, berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui devisa, pembukaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha baru, dan sekaligus mendorong bagi terjadinya revitalisasi budaya. Sebab, produk industri pariwisata tidak diandalkan dari eksploitasi sumberdaya alam, melainkan lebih berorientasi pengelolaan, pelestarian, dan revitalisasi eksotisitas alam tersebut serta budaya masyarakatnya.

Ternyata, pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat tidak bebas konflik. Pada permukaan, konflik seolah-olah muncul dari kekuatiran terhadap potensi kepariwisataan sebagai pollutant terhadap sistem nilai (adat dan agama) yang mereka anut. Alasan itu yang mendasari konflik di objek wisata Maninjau dan kawasan wisata lainnya. Dengan dasar itu Pemerintah Daerah Sumatera Barat menyosialisasikan kebijakan clean tourism (pariwisata bebas maksiat) pada 1997. Kebijakan itu menyiratkan sikap kompromistik terhadap dua tuntutan yang paradoks dalam pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat, yaitu: tuntutan progressif-ekonomik sekaligus tuntutan ekspressif-etik (Hasanuddin, 1999, 2000. op.cit.). Dengan kata lain, kebijakan pariwisata bebas maksiat itu menggambarkan sikap kompromistik atas dikotomi potensi

konstruktif (terutama secara ekonomik) dan dampak destruktif (terutama secara kultural) kepariwisataan. Hal itu sesungguhnya sekaligus juga memperlihatkan sikap ambiguitas Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera Barat dalam mengembangkan kepariwisataan.

Kabupaten Padang Pariaman sesungguhnya memiliki peluang dan potensi besar untuk mengembangkan kepariwisataan, karena di samping kemudahan aksesibilitas dan keindahan alamnya, juga kekayaan dan keunikan budaya masyarakatnya. Namun, pengembangan kepariwisataan di kabupaten ini pun ternyata tidak bebas konflik. Konflik-konflik di objek wisata terjadi, bahkan dalam ekspresinya yang anarkhis, seperti di Malibou Anai tahun 2000.

Pemicu konflik, sebagaimana memusat ke permukaan, adalah karena isu objek wisata itu memfasilitasi maksiat. Akan tetapi, ada indikasi penyebab lain. Pertama, objek wisata Anai Resort dengan fasilitas lapangan golf; belasan villa; dan bumi pekemahan, yang berdiri di samping puing-puing kehancuran objek wisata Malibou Anai, tidak mengundang konflik. Kedua, ada indikasi hubungan antar unsur di masyarakat setempat (khususnya pemuda dengan ninik mamak dan pengambil keputusan di tingkat nagari) tidak harmonis. Ketiga, secara sosio historis, konflik dalam masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) adalah built in. Jadi, konflik-konflik tidaklah dilandasi faktor ideologis semata, yang dapat diredakan pada tataran konseptual-ideologis pula, akan tetapi membentuk suatu jaringan yang kompleks pada tataran praktis.

Potensi konflik yang built in pada masyarakat Minangkabau Sumatera Barat telah lama disadari oleh para pakar sosio kultural Minangkabau, akan tetapi seringkali konflik itu tidak dikelola dengan baik oleh pemegang kekuasaan. Hal itu kontra produktif terhadap program pengembangan kepariwisataan dan program pembangunan lainnya dalam mewujudkan Sumatera Barat menjadi pintu gerbang Barat Indonesia. Oleh karena itu, penjelasan terhadap berbagai hal tentang konflik (bentuk, pelaku, substansi, aspirasi-aspirasi dan tuntutan-tuntutan yang mendasari konflik, serta fungsi dan makna konflik itu), perlu diberikan secara objektif-ilmiah, agar dapat menjadi

dasar bagi semua pihak (termasuk pemerintah selaku pengambil keputusan) dalam menentukan langkah-langkah progresif dan atau dalam memberikan partisipasi bagi pembangunan dan pengembangan masyarakat ke masa depan.

## PENDEKATAN

Paradigma Fakta Sosial Durkheim, menawarkan pendekatan analisis konflik di samping struktural fungsional. Konflik merupakan unsur dasar yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan manusia. Konflik tidak dapat dilenyapkan, bahkan menjadi dasar bagi integrasi dan perubahan sosial. Dengan begitu, konflik merupakan sesuatu yang positif dan fungsional apabila diatur melalui mekanisme tesis-antitesis-sintesis berdasarkan filsafat dialektika Hegelian (Dahrendorf, 1986; Smith, 1987: 77; Soelaiman, 1998: 64, Ritzer, 1985).

Dalam memahami dinamika masyarakat Minangkabau, penggunaan teori Konflik adalah pilihan yang tepat. Sebab, secara filosofis, orang Minangkabau hidup dalam dialektik *bakarano-bakajadian* (bersebab-berakibat), karena itu mereka dinamis (Navis, 1984: 59-60). Konflik dalam masyarakat Minangkabau built in, dan konflik membayangkan kedinamikaan, sesuai konsep *basilang kayu dala tungku, baitu api mako ka iduk* (bersilang kayu dalam tungku, dengan begitu maka api akan hidup) (Nasroen, 1971; Naim, 1983). Artinya, konflik diperlukan dan dari konflik-konflik itu diharapkan lahir konsensus-konsensus dan sintesis-sintesis kultural (Hasanuddin, 1992; 1999).

Secara realistik masyarakat Minangkabau adalah masyarakat tribal, terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang mandiri dan otonom, namun keluar secara totalitas adalah satu. Falsafah hidup mereka mengajarkan kesamaan dan persaingan, tetapi juga harmoni atau keseimbangan, yang menyebabkan konflik dalam masyarakat mereka menjadi sesuatu yang lumrah dan diniscayakan terjadi. Persaingan, permusuhan, dan bahkan kadangkala juga peperangan, terjadi tidak saja antar suku dalam suatu kesatuan teritorial nagari, melainkan juga antar nagari-nagari yang berdekatan (Radjab, 1970: 16,

Mansyur, 1970). Konflik-konflik seringkali terjadi, namun konsensus juga selalu dihasilkan. Naluri berkonflik diimbangi dengan kemauan berkonsensus.

Konflik terbesar dalam sejarah sosial Minangkabau adalah antara Adat dan Islam yang diaktualisasikan oleh pendukung kedua ajaran itu. Konflik yang mendasar tersebut mencapai puncaknya pada paruh awal abad ke 19, yang memuara menjadi Perang Paderi (1821-1837). Motivasi konflik adalah pembaharuan dan pemurnian kehidupan keagamaan masyarakat. Namun ironisnya, konflik internal antara kaum konservatif lokal dengan kelompok reformis radikal dari kaum puritan muslim itu justru dimenangkan pihak ketiga, yakni kolonialis Belanda (Zed, 1992). Namun episode yang terpenting dari konflik tersebut adalah ketika Belanda belum campur tangan, yaitu sewaktu orang Minangkabau harus berhadapan dengan diri dan tradisinya sendiri (Schrieke, 1973).

Konflik-konflik yang terjadi, betapapun keras dan sentralnya, tetap tidak untuk saling melenyapkan, sebab dalam filosofi hidup mereka adalah: mahampang malapehi, mambunuan mahidui-i (mengempang-melepaskan, membunuh-menghidupi). Gerakan Paderi yang radikal, yang berlanjut menjadi perang melawan kolonialis Belanda selama 34 tahun, tidak serta merta membasmi ajaran Tarekat Syatariyah (Navis, 1983: 70-71). Demikian pula terhadap Kaum Adat, gerakan Paderi menurut Schrieke (1973: 32, ibid), bukanlah untuk menentang adat dan kerajaan Pagarruyung, melainkan gerakan solidaritas ulama untuk membersihkan kehidupan masyarakat dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Kajian awal kepariwisataan memperlihatkan secara kuantitatif signifikan bahwa pariwisata (internasional atau domestik) adalah industri yang sangat potensial. Pariwisata tidak saja penghasil devisa, akan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan memberdayakan serta meningkatkan taraf

perekonomian masyarakat daerah tujuan wisata setempat. Hal itu tidak semata-mata disebabkan dampak ekonomi pariwisata lebih terukur dan terbaca secara kuantitatif, akan tetapi lebih diwarnai oleh optimisme bahwa manfaat ekonomi pariwisata tertuju bagi masyarakat daerah tujuan wisata setempat (Cooper dan Archer dalam Theobald ed. 1994: 73-91).

Di samping penelaahan-penelaahan tentang dampak positif kepariwisataan secara ekonomik di atas, penelitian dampak pariwisata terhadap kebudayaan dan lingkungan juga telah banyak dilakukan. Rohter, dengan gamblang menggambarkan bahwa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Hawaii telah menimbulkan konsekuensi lingkungan yang parah dan terjadinya erosi nilai tradisional (Rohter, 1992).

Para peneliti kepariwisataan di Bali menunjukkan hal yang berbeda. Kekhawatiran masyarakat Bali terhadap "kehancuran" budaya mereka akibat pariwisata, sebagaimana ditunjukkan pada tahun 1970-an, ternyata setelah puluhan tahun tidak terbukti (Soemardjan, 1987). Dampak negatif pariwisata hanya pada "kulit luar" tidak menyentuh kepada "inti" kebudayaan Bali (Astika, 1991; Mantra, 1990). Bahkan pada beberapa aspek, pariwisata dapat dikatakan pemerkokoh kebudayaan Bali. Walaupun terjadi perubahan, perubahan tersebut masih berada pada arus keberlanjutannya (Pitana, 1992).

I Made Sudana (2004) mengungkap konflik kepariwisataan di Sulawesi Utara. Dalam penelitiannya, Sudana mengungkapkan bahwa dalam pelestarian Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebagai objek wisata terjadi konflik. Konflik tersebut wujud secara vertikal dan horizontal. Konflik vertikal disebabkan kurang tanggapnya pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat, akibatnya partisipasi masyarakat gagal digalang. Sementara itu, konflik horizontal disebabkan oleh perebutan lahan mencari nafkah antar sesama warga, dari objek wisata.

Beberapa penelitian awal tentang kepariwisataan Sumatera Barat telah pula dilakukan. Roza Dewita meneliti tentang pengaruh keberadaan objek pariwisata terhadap pekerjaan dan pendapatan masyarakat di sekitarnya

(Kasus: Anai Resort dan Golf Course) di Padang Pariaman. Sejumlah 312 dari 470 orang yang bekerja disana adalah penduduk sekitar, namun mereka berada pada level bawah dalam struktur pekerjaan, yaitu sebagai pekerja harian. Meskipun status pekerjaan mereka tidak berubah dari buruh tani menjadi pekerja harian, mereka lebih memilih bekerja di Anai Resort, karena pekerjaan jelas, rutin, dan lebih ringan. Dampak terhadap lapangan usaha baru dan peningkatan kualitas pekerjaan tidak terlihat, karena objek wisata itu bersifat enclave tourism. (Dewita, 1996: 44).

Thomas Daniel Huerst menyatakan bahwa keindahan alam Sumatera Barat dan Indonesia secara umum telah merosot karena tangan manusia. Hal itu terjadi karena kewaspadaan terhadap lingkungan kalah oleh kebutuhan manusia mencari nafkah. Di samping itu, terjadi penurunan kunjungan "wisatawan ransel" yang mendominasi gambaran wisatawan mancanegara Sumatera Barat. Hal itu terjadi karena berbagai peristiwa buruk yang melanda Indonesia sejak 1997 dan kebijakan Pemerintah Pusat mencabut kebebasan visa bagi kebanyakan negara Barat. Semua itu mengancam perkembangan kepariwisataan Sumatera Barat (Huerst, 2004).

Sebelumnya, tahun 1999 Hasanuddin meneliti tentang Clean Tourism, Konflik, dan Konformitas dalam Kepariwisata di Sumatera Barat. Hasanuddin menjelaskan bahwa kepariwisataan Sumatera Barat tidak bebas konflik, karena citra dan efek kepariwisata itu disadari berpotensi pollutant terhadap sistem sosio kultural Minangkabau. Oleh karena itu, kepariwisataan cenderung ditolak. Meskipun begitu, secara sosio kultural masyarakat Minangkabau memiliki sikap kompromistik, dan gagasan clean tourism (pariwisata bebas maksiat) merupakan wujud kompromistik tersebut.

Semua penelitian di atas bersifat parsial dan belum mengungkap persoalan kepariwisataan Sumatera Barat secara holistik. Hasanuddin, sekalipun mencoba mengupas persoalan konflik dan konformitas dalam pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat, pembahasannya masih fokus pada persoalan konsepsional yang didukung data pada satu situs penelitian. Konflik struktural



dalam masyarakat Minangkabau ternyata jauh lebih kompleks daripada konflik konseptual ideologis, sebagaimana digambarkan Hasanuddin. Dan yang 'mengejutkan' adalah adanya fenomena bahwa kepariwisataan hanyalah 'pemicu' meletusnya konflik laten dalam kehidupan sosial yang semraut dan terkontaminasi secara kultural. Dengan begitu, penanganan konflik tersebut seyogianya tidak sekadar pada hal-hal teknis yang menyangkut kepariwisataan saja akan tetapi meliputi usaha harmonisasi kembali hubungan-hubungan sosial, bahkan restrukturisasi sosio kultural.

#### KONSEPSI

Orang Minang mengklaim diri mereka sebagai masyarakat yang dinamis dan fleksibel sebagaimana diajarkan oleh falsafah hidup mereka: alam terkembang jadi guru. Hal itu ditandai oleh berbagai konsep seperti sakali aie gadang sakali tapian barubah, patah tumbuh hilang berganti (sekali air besar, sekali tepian berubah; patah tumbuh hilang berganti). Maksudnya, falsafah alam mereka memberikan berbagai inspirasi tentang kedinamikaan dan perubahan yang alamiah dan tak mungkin dihambat. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam hidup sangatlah diperlukan. Agar anak-anak Minangkabau itu mampu kreatif, dinamis, dan berwawasan luas dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, maka secara sosial mereka melembagakan tradisi merantau. Dari perantau-perantau itulah lahir ide-ide pembaharuan, seperti ide-ide pembaharuan adat dan kehidupan keagamaan (Islam) abad ke-19, ide-ide nasionalisme abad ke-20, bahkan ide-ide orientasi kebangsaan yang mengacu ke peradaban Barat yang maju seperti diartikan oleh Sutan Takdir Alisyahbana.

Namun demikian, secara bersamaan, mereka juga memegang konsep adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan (adat nan tidak lakang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan) sebagai pondasi adat yang tidak boleh berubah. Konsep sakali aie gadang sakali tapian berubah sekaligus juga menjadi peringatan terhadap mereka agar melakukan berbagai tindakan antisipasi agar air gedang itu tidak terjadi. Ide-ide yang terefleksi dalam

berbagai perdebatan intelektual dan kultural termasuk dalam bentuk "sastra protes", sejak awal abad ke-20, mencerminkan ketidaksediaan mereka menerima akibat logis dari sikap terbuka terhadap dunia maju. Berbagai kritik terhadap tradisi, sesungguhnya ditujukan kepada sistem perilaku daripada gugatan terhadap struktur dan dasar moralnya (Abdullah, 1984).

Ada dua kecenderungan sekaligus yang paradoks, yaitu berupa "dorongan" dan "hambatan" dalam fenomena kultural masyarakat Minangkabau dalam mendukung keterbukaan dan kemajuan. Fenomena paradok ini tercermin juga dalam sikap mereka terhadap globalisasi, tempat berkembangnya dengan amat pesat industri kepariwisataan. Globalisasi dan kepariwisataan adalah ibarat air gadang yang akan mengubah tepian (sendi-sendi budaya) mereka. Pariwisata adalah 'faktor luar' yang mengancam akan 'menghantam' masyarakat mereka, sebagai model 'bola bilyard'nya R. E. Wood (Wood, 1980). Sebagaimana dikemukakan oleh Wood, dalam model 'bola-bilyard', objek yang bergerak (pariwisata) secara langsung atau melalui objek perantara (broker kebudayaan), menghantam objek yang diam (kebudayaan daerah). Dalam hal ini kebudayaan diasumsikan sebagai sesuatu yang diam, tidur, atau pasif, dan homogen.

Kepariwisata bagi Sumatera Barat di satu sisi didambakan (secara ekonomik) tetapi sekaligus ditakuti dan ditolak (secara etik-kultural). Ketakutan yang ada memang belum sampai pada kesimpulan Brohman (1996: 55) bahwa peranan pariwisata sebagai paspor untuk pembangunan harus dikaji ulang, karena akan memunculkan kolonialisme baru dalam bentuk ketergantungan (dependency) yang begitu mencekik leher. Namun mereka menyadari sepenuhnya bahwa dampak sosial-budaya pariwisata terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama –bahkan bisa bertolak belakang– dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain. Demikian juga mengenai penilaian tentang positif dan negatif, sangat sulit untuk digeneralisasi, karena sebagaimana dikemukakan Pitana, penilaian positif atau negatif tersebut sudah merupakan penilaian yang mengandung 'nilai' (value judgement), sedangkan nilai tersebut

tidak selalu sama bagi segenap kelompok masyarakat. Artinya, dampak positif ataupun negatif masih perlu dipertanyakan, "positif menurut siapa dan negatif menurut siapa?" Pitana, 1999). Dalam hal ini, mereka menyadari bahwa apa yang dialami Bali sebagai sesuatu yang positif, belum tentu akan diperoleh sama oleh mereka.

Sikap penolakan (counter trend) terhadap pengaruh kebudayaan global (budaya asing) dan kepariwisataan itu, sejalan dengan pendapat Naisbitt dan Aburdene, menimbulkan hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa sendiri (Naisbit, 1990). Namun, hambatan pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat tidak semata-mata soal penolakan, akan tetapi juga ketidaksiapan. Sehubungan dengan itu, hambatan kultural, dalam konteks ini, mengandung arti "segala sesuatu yang menjadi kultur dalam kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat; baik pada tataran ideologis maupun praktis, yang disadari atau tidak, berupa ketahanan (sesuatu yang masih utuh atau stabil) atau kerusakan (sesuatu keadaan dalam kondisi rusak), yang berperan sebagai faktor penghambat bagi pengembangan kepariwisataan".

## **PEMBAHASAN**

### **Monografi Singkat Padang Pariaman**

Kabupaten Padang Pariaman adalah satu kabupaten di Sumatera Barat yang menghadap ke Samudera Indonesia. Panjang garis pantai 60,5 Km dan luas perairan laut 2.551,35 Km, dengan dua buah pulau kecil, yaitu: Pulau Pieh (3 Ha) dan Pulau Bando (3,5 Ha). Tata guna lahan sebagian besar dimanfaatkan untuk budi daya pertanian (60,78%) dan 31,7% masih berupa hutan dan semak belukar (BPPS, 2004). Secara administratif pemerintahan kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 45 nagari. Delapan belas persen penduduk pada tahun 2000 bekerja pada sektor pertanian, dan 07,06% bekerja pada sektor perdagangan. Pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi pada 1998 adalah 4,68%. Pendapatan regional perkapita kabupaten ini meningkat Rp 4,82 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 5,32 juta pada tahun

2003, dan 6,32 juta pada tahun 2004; dengan kenaikan 11,51 persen. Penyumbang terbesar bagi PDRB tahun 2003 adalah sektor pertanian (29%), diikuti sektor Jasa (18,12%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (15,44%), dan sektor industri (15,70%) (Sekda, 2004).

### **Potensi Kepariwisata**

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi kepariwisataan yang cukup banyak, terutama wisata alam, wisata keagamaan, dan wisata budaya. Dari 17 kecamatan yang ada, Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 mencatat 69 objek wisata, baik berupa alam (pantai, air terjun), sejarah, budaya, religius, maupun objek wisata minat khusus.

Satu-satunya daerah tujuan wisata yang dikelola dengan relatif baik adalah Anai Resort dengan fasilitas berupa penginapan; lapangan golf; bumi perkemahan, dan pemandian alam Tirta Alami. Selain itu terdapat kawasan Malibou Anai, Lubuk Bonta, Air Terjun Langkuik, Gunung Tigo, dan lain-lain. Potensi wisata bahari terdapat Pulau Pieh, Pantai Arta, Pantai Arga, dan Pantai Tirta Bahari. Potensi wisata religius dan budaya terdapat makam Syekh Burhanuddin dengan aktivitas ritual utama pada bulan Syafar pada kalender Hijriyah dan surau-surau tradisional dengan berbagai ritual dan seremonial pada bulan-bulan maulud (maulud nabi), bulan sambareh, bulan ramadhan, dan sebagainya. Demikian pula objek kerajaan-kerajaan kecil yang sekalipun secara formal administratif dalam sistem pemerintahan NKRI tidak eksis, akan tetapi secara informal keberadaannya masih dipertahankan dan berperan secara sosio kultural. Tidak kalah penting adalah tradisi ikan larangan sebagai modal sosial dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Di samping itu, potensi seni budaya daerah seperti: ulu ambek, indang, simarantang, rabab, dan dabuih; juga merupakan aset yang eksotik.

Saat ini, sejak Pariaman resmi menjadi Kota dan Mentawai menjadi kabupaten tersendiri, satu-satunya objek kepariwisataan kabupaten Padang Pariaman yang memadai dengan fasilitas akomodasi dan daya tarik wisata

(golf, pemandian, dan perkemahan) hanyalah Anai Resort, di nagari Guguk Kecamatan 2X11 Kayutanam. Namun, beberapa kawasan potensial untuk pembangunan sarana akomodasi adalah daerah Katapiang (sekitar bandara internasional MIA), daerah Duku sebagai penunjang kawasan industri dan bandara internasional, kawasan garis pantai (sepanjang 60,50 KM), Lubuk Alung yang berkembang pesat sebagai kota transit, serta Sicincin dan Kayutanam sebagai daerah peristirahatan.

Intinya, kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi kepariwisataan berupa alam dan budaya yang masih perawan dan sangat belum tergarap. Keberadaan Bandar udara internasional (Minangkabai International Airport) di Katapiang, dalam wilayah kabupaten Padang Pariaman, juga menjadi faktor pendorong yang kuat agar Pemerintah Daerah setempat secara serius menggarap potensi kepariwisataannya. Walaupun demikian, potensi tersebut di samping belum tergarap dari sudut pandang ekonomi kepariwisataan juga dari sudut pandang sosio kultural, sebagaimana akan dijelaskan berikut.

### **Konflik-Konflik**

Konflik-konflik di objek wisata, di kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat, dapat diterangkan sebagai berikut.

#### **1. Deskripsi Konflik**

##### **a. Malibou Anai**

Malibou Anai berada di Lembah Anai, Korong Kandang Ampek, Nagari Guguk Kecamatan 2X11 Kayutanam. Kandang Ampek pada zaman Belanda merupakan tempat dibangunnya pabrik susu perah, tanahnya berupa koral dan karenanya cukup gersang untuk budidaya pertanian. Setelah tidak ada pabrik susu perah, mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah mencari kayu api. Begitu tidak menjanjikannya secara ekonomik, Kandang Ampek digambarkan oleh penduduknya dalam sebuah pantun:

Kandang ampek kampuang tasapik  
Lalu babunyi si lonceang tigo  
Kok nyo dapek jalan ka langik  
Tampan ka tingga dunia nangko.<sup>1</sup>

Namun potensi daya tarik wisata daerah ini telah disadari dan diungkapkan oleh Mayor Dahlan, komandan militer Sumatera Tengah pada tahun 1968. Objek wisata alam yang sudah terkenal di kawasan itu adalah Air Mancur, sebuah air terjun di pinggir jalan dekat persilangan jalan raya Padang Bukittinggi dengan jalan kereta api.

Malibou Anai dibangun pada 1997, namun pada tahun 2000 (3 tahun setelah dibangun), terbakar. Akibat kebakaran itu, investor mengalami kerugian milyaran rupiah, dan sebagian anggota masyarakat setempat kehilangan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Belasan pelaku dalam tindakan anarkhis itu diproses secara hukum. Isu maksiat mengemuka sebagai pembenar tindakan anarkhis kala itu. Pemicu konflik adalah kesalahpahaman pengelola dengan pemuda setempat, namun secara laten sesungguhnya ada beberapa faktor yang menjadi pra kondisi bagi terjadinya konflik. Faktor-faktor dimaksud adalah :

- i. Tidak terakomodasikannya aspirasi dan tuntutan dasar masyarakat dalam negosiasi pembebasan lahan dan penetapan kebijakan publik.
- ii. Harapan untuk memperoleh lapangan kerja dan kesempatan berusaha baru, di Malibou Anai sia-sia. Tuntutan warga cenderung ditanggapi pengelola dengan pendekatan "kekuasaan" melalui pembekingan oknum tentara. Hal itu menumbuhkan bibit permusuhan yang potensial membuahkan konflik.
- iii. Pemuda setempat meminta persentase retribusi, terutama dari hasil penyewaan bumi perkemahan, tanpa ikut memberikan kontribusi, seperti dalam hal pengamanan.

---

<sup>1</sup> Wawancara, 14 Mei 2006, di Malibou Anai

iv. Tidak berjalannya sistem sosial di masyarakat setempat, menyebabkan konflik tidak terantisipasi.<sup>2</sup>

b. Lubuk Bonta

Lubuk Bonta berada di Korong Tarok, Nagari kepala Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayutanam. Objek wisata Lubuk Bonta, yang berada di kawasan perkebunan karet yang diklaim pemerintah sebagai 'tanah negara bekas erfacht', (Refinaldi, 2000) yang masa Orde Baru, dikuasai oleh tentara dan pengelolaannya dilakukan oleh purnawirawan ABRI asal Jawa, pembebasan sebagian lahan perkebunan untuk perumahan dilakukan pengelola secara sembunyi-sembunyi dan tidak adil, yang menyulut sentimen etnis antara pribumi dan pendatang (Jawa). Walau tidak sampai terjadi kekerasan terhadap kemanusiaan, namun penjarahan terhadap tanah perkebunan tak terkendali. Penjarahan juga dilakukan terhadap lahan objek wisata seluas 5 Ha, dan yang ironis penjarahan itu ternyata memperoleh pengukuhan melalui penerbitan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional di Pariaman. Di samping itu, konflik perebutan retribusi sering terjadi, antara pengelola dengan pemuda setempat atau di antara sesama warga.

c. Objek Wisata Pantai

Dari sepanjang 60,5 Km bibir pantai yang dimiliki kabupaten Padang Pariaman, terdapat 8 kawasan yang dijadikan objek wisata. Konflik-konflik terjadi berkaitan dengan soal retribusi. Di satu pihak, masyarakat setempat berpandangan bahwa retribusi kunjungan merupakan hak mereka, karena alam; hutan; gunung; dan pantai merupakan ulayat nagari bersangkutan. Oleh karena itu, petugas lapangan dari dinas terkait seringkali diusir. Sedangkan di pihak lain, aparat pemerintah terkait berpandangan bahwa retribusi itu merupakan hak sekaligus sumber pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah,

---

<sup>2</sup> Wawancara 13 Mei 2006, di Malibou Anai.

karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, alam; hutan; gunung; dan pantai, adalah tanah negara.

## 2. Bentuk-Bentuk Konflik

Konflik di objek wisata lahir dalam bentuk konflik horizontal dan vertikal; konflik laten dan manifest; konflik konstruktif dan anarkhis.

- a. Konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, baik di tingkat nagari maupun yang lebih tinggi. Substansi konflik vertikal berkaitan dengan tuntutan kebijakan partisipatif; kebijakan yang mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat tempat sebuah kebijakan itu dilaksanakan, terutama berkaitan dengan pembagian "kue" pariwisata.
- b. Konflik horizontal terjadi di antara sesama anggota masyarakat setempat, berupa perebutan hasil retribusi kunjungan objek wisata.
- c. Konflik laten merupakan benih-benih permusuhan yang tumbuh akibat "kecurangan, pelecehan, atau pengabaian" atas hak-hak warga negara oleh pihak lain, baik oleh aparat pemerintah maupun pengusaha. Hak-hak itu berupa hak partisipasi dalam kebijakan publik dan hak sosio kultural dalam wujud "anugerah" alam berupa objek wisata di tanah ulayat.
- d. Konflik manifest muncul ketika konflik laten tidak tarpahami secara arif, sehingga kebutuhan dialog tidak tertembuskan. Akumulasi konflik laten memuncak dan meledak dalam bentuk konflik manifest, yang dalam batas tertentu bisa berwujud konstruktif tetapi seringkali justru destruktif
- e. Konflik konstruktif muncul dalam bentuk protes argumentatif yang disampaikan sebagai kritik dan koreksi terhadap suatu kebijakan publik. Sayangnya, seringkali ditanggapi dengan sikap dingin dan tertutup, akhirnya berkembang menjadi benih-benih permusuhan dan perlawanan dan meletus menjadi konflik anarkhis.
- f. Konflik destruktif lahir dalam bentuk anarkhis, yaitu bentuk perlawanan terhadap kekuasaan, dengan tindakan-tindakan tak terkontrol dan melawan hukum. Akibat anarkhisme itu sangat buruk karena menimbulkan trauma



dan kerusakan psikologis berat bagi korbannya, yang membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya dan menghambat bagi berjalannya suatu program pembangunan masyarakat

### **3. Fungsi dan Makna Konflik**

Bentuk-bentuk Konflik-konflik, sebagaimana dideskripsikan di atas, mengemban fungsi destruktif dan konstruktif. Fungsi destruktif berkembang menjadi faktor penghambat bagi keberlangsungan sosio kultural, sedangkan fungsi konstruktif berperan sebagai kritik; koreksi-evaluatif, dan faktor pendorong terjadinya kohesi sosial.

#### **a. Konflik sebagai Destruksi**

Konflik-konflik sebagai destruksi, baik laten maupun manifes, bersumber pada setidaknya lima aspek, yaitu: aspek ideologis, sistem sosial yang mandeg, persoalan tanah ulayat, lemahnya koordinasi dan kerjasama antar kelembagaan terkait, serta kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah.

#### **i. Faktor Ideologis**

Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat memegang teguh falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Adat bersendi Islam, dan Islam bersendi Al Qur'an). Konsep Islam cukup kuat memberi corak pemikiran dan orientasi masyarakat. Dari kacamata itu, kepariwisataan dipandang sebagai sektor ekonomi yang tidak bebas maksiat, sesuai imej 5S (sun, sex, sights, savings, and servility) (Crick, 2002). yang melekat padanya. Kebijakan kompromistik clean tourism, tidak serta merta menghapus imej maksiat itu, akan tetapi melukiskan sikap ambiguitas dalam pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat (Hasanuddin, 1999, op.cit). Berhadapan dengan kenyataan itu, alasan ideologis "memberantas aksiat" dijadikan "tameng" pembenar tindakan provokatif dan anarkhis dalam konflik di objek wisata, seperti pada kasus Malibou Anai.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara 13 Mei 2006, di Malibou Anai.

## ii. Sistem Sosial yang mandeg

Secara konseptual, sistem adat Minangkabau tidak memberi ruang untuk apapun bentuk tindakan anarkhis. Sekalipun konflik diniscayakan terjadi, basilang kayu dalam tungku, baitu api mako ka iduik (bersilang kayu dalam tungku, dengan begitu maka api akan hidup), tetapi konsensus selalu mesti diperoleh. Struktur masyarakat dibentuk berdasarkan hirarki 'kebenaran' bahwa kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana barajo ka alue jo patuik (kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada yang benar, yang benar beraja kepada alur dan patut). Dengan struktur begitu, tidak ada tindakan yang tidak terkontrol. Suatu tindakan merupakan buah dari keputusan final, setelah menempuh prosedur konsultatif berlapis (dari kamanakan kepada mamak, mamak kepada penghulu, dan penghulu membawanya kepada permufakatan) dan dipertimbangkan berdasarkan alur (pertimbangan hukum) dan kepatutan (pertimbangan kemanusiaan). Sesuatu yang diterima kebenarannya menurut alur belum tentu patut untuk dilakukan. Untuk menentukan patut atau tidak suatu tindakan, digunakan pareso atau periksa (pertimbangan rasional) dan raso atau rasa (pertimbangan perasaan): raso dibao naiak, pareso dibawa turun 'rasa dibawa naik, periksa dibawa turun'. Jadi, tindakan mestilah sintesis dari berbagai paradoks yang ada dan diperdebatkan secara rasional dan emosional.

Bila demikian, suatu tindakan anarkhis, seperti dalam kasus terbakarnya objek wisata Malibou Anai tahun 2000, jelas mencerminkan tidak bekerjanya sistem sosial di masyarakat tempat objek wisata itu berada. Desakan ekonomi dan berbagai tuntutan riil kehidupan, telah mengakibatkan renggang dan nyaris putusnya hubungan ideal pemuda (para kemenakan) dengan Wali Nagari, ninik mamak dan pemuka masyarakat lainnya (para mamak), sehingga masing-masing cenderung melakukan tindakan sendiri-sendiri.

### iii. Persoalan Tanah ulayat

Objek wisata alam (hutan, pantai, danau, sungai, gunung, dan lembah), yang sejauh ini diandalkan Sumatera Barat, secara adat meupakan ulayat, suatu kaum; suku; atau nagari.<sup>4</sup> Namun hal itu berhadapan dengan ketentuan hukum negara yang menempatkan semua itu sebagai milik negara. Tarik menarik oleh dua sumber hukum itu menjadi dasar terjadinya konflik.

### iv. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia

Secara kelembagaan, visi kepariwisataan pemerintah daerah Padang Pariaman masih lemah. Saat ini urusan kepariwisataan dikelola oleh Kantor Pariwisata Seni Budaya, dengan fasilitas yang relatif tidak layak dan sumberdaya manusia yang relatif belum memadai.<sup>5</sup> Demikian pula, kerjasama lintas-lembaga, antara Lembaga Kepariwisata (Dinas/ Kantor Pariwisata Seni Budaya) dengan Dispenda, Badan Pertanahan Negara, Satpol PP, dan nagari, juga relatif tidak sinergik-konstruktif.

### b. Konflik sebagai Konstruksi

Konflik tidak selalu destruksi melainkan berpotensi konstruktif juga. Fungsi konstruktif konflik lebih dapat dilihat sebagai "hikmah" di balik konflik. Fungsi itu berupa kritik, koreksi-evaluatif, dan kohesif.

Fungsi konstruktif konflik lebih dapat dilihat sebagai "hikmah" di balik konflik. Konflik merupakan ekspresi kritik terhadap diri dan lawan, koreksi-evaluatif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, dan kesadaran bagi pemeliharaan kohesi sosial (ikatan-ikatan persaudaraan antar individu dan kelompok di dalam kehidupan masyarakat). Jelasnya, konflik menumbuhkan kesadaran hukum, kesadaran perlunya kebijakan publik yang partisipatif dengan mengakomodasi aspirasi-aspirasi, tuntutan-tuntutan, kebutuhan-kebutuhan warga yang akan dipengaruhi atau menanggung akibat dari kebijakan itu, kesadaran sosial investor, dan kesadaran perlunya peningkatan

---

<sup>4</sup> Wawancara 15 Mei 2006, di Pariaman..

<sup>5</sup> Wawancara 15 Mei 2006 di Pariaman.

kinerja dan kerjasama kelembagaan yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan, seperti Dinas Pariwisata; Dinas Pendapatan Daerah; dan Badan Pertanahan Nasional. Fungsi konstruktif juga mendorong pemerintah, investor, dan masyarakat untuk berpikir kreatif; inovatif; dan profesional, untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang beragam, tidak hanya memperebutkan "anugerah" berupa keindahan alam tanpa menanam bibit memperindahkannya untuk kemudian dipetik hasilnya.

## **PENUTUP**

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan tidak dapat dipungkiri, menjadi sektor andalan pembangunan ekonomi daerah di masa datang. Kabupaten Padang Pariaman memiliki peluang dan potensi kepariwisataan yang cukup baik, karena kemudahan aksesibilitas dan keunikan sosio kultural masyarakatnya. Namun, pengembangan kepariwisataan di daerah ini tidak bebas konflik. Konflik-konflik terjadi dalam bentuk baik vertikal dan horizontal, laten dan manifes, maupun konstruktif dan destruktif.

Konflik-konflik memiliki fungsi dan makna destruktif dan juga konstruktif. Konflik-konflik sebagai destruksi, baik laten maupun manifes, bersumber pada setidaknya lima aspek, yaitu: aspek ideologis, sistem sosial yang mandeg, persoalan tanah ulayat, lemahnya koordinasi dan kerjasama antar kelembagaan terkait, serta kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah. Fungsi dan makna konstruktif konflik lebih dapat dilihat sebagai "hikmah" di balik konflik. Fungsi itu berupa kritik, koreksi-evaluatif, dan kohesi sosial. Konflik merupakan ekspresi kritik terhadap diri dan lawan, koreksi-evaluatif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, dan penyadaran bagi pemeliharaan kohesi sosial (ikatan-ikatan persaudaraan antar individu dan kelompok di dalam kehidupan masyarakat). Jelasnya, konflik menumbuhkan kesadaran hukum, kesadaran perlunya kebijakan publik yang partisipatif (dengan mengakomodasi aspirasi-aspirasi, tuntutan-tuntutan, kebutuhan-kebutuhan warga yang akan dipengaruhi atau menanggung akibat dari kebijakan itu), kesadaran sosial investor, dan

kesadaran perlunya peningkatan kinerja dan kerjasama kelembagaan terkait, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. \*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1984. "Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau" dalam A.A. Navis, Ala Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafitipers. (Hal. IX-XXIII)
- Astika, Ketut Sudana. 1992. "Bali Dalam Sentunan Pariwisata". Working Paper Proyek Comprehensive Tourism Development Plan for Bali. Denpasar.
- Bogdan, R.C. and S.J. Taylor. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial. Surabaya: Usaha Nasional.
- Cooper, Chris and Brian Archer. 1994. "The Positive and Negative Impacts of Tourism". Dalam Theobald (ed.): Global Tourism, The Next Decade. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Crick, Malcolm. 2002. "Representation of International Tourism in The Social Sciences: sun, sex, sights, savings, and servility" The Sociology of Tourism, Theoretical and Empirical Investigation. Ed.: Yorghos Apostolopoulos, Stella Levadi and Andrew Yiannakis. London and New York, Routledge.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Suatu Analisis Kritik. Edisi Indonesia. Jakarta: Rajawali
- Dewita, Roza. 1996. "Pengaruh Keberadaan Objek Pariwisata Terhadap Pekerjaan dan Pendapatan Masyarakat di Sekitarnya (Kasus Anai Resort dan Golf Course)", Skripsi, Padang: FISIP Unand.
- Hasanuddin. 1999. "Clean Tourism, Konflik, dan Konformitas, Studi Kasus Kepariwisataaan di Maninjau Sumatera Barat" (Tesis) PS Magister Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Hasanuddin. 2000. "Clean Tourism, Konflik dan Konformitas: Studi Kasus Kepariwisataaan Sumatera Barat". Denpasar: Jurnal Internasional DIALOG, (vol 1 No.1). Th. 2000.

- Huerst, Thomas Daniel. 2004. "Pariwisata dan Kebudayaan di Sumatera Barat: Antara Parasitisme dan Mutualisme (Makalah pada Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau 22-23 Nopember), Padang: Dinas Pariwisata Seni Budaya. Sumatera Barat
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. "Metode Penggunaan Bahan Dokumen". Dalam Koentjaraningrat dan Fuad Hassan (ed.): Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, 1990. "Metode Wawancara". Dalam Koentjaraningrat dan Fuad Hassan (ed.): Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas, 2005, "Sumbar Menyiapkan Diri Menuju Gerbang Barat Indonesia: Mencermati Pembangunan di Sumbar Lima Tahun Terakhir" (15 Maret, hlm.30).
- Mansoer, M.D. 1970. Sejarah Minangkabau. Jakarta: Bharatara.
- Mantra, I.B. 1990. "Dampak industri pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya di Ubud Bali". Bali Sustainable Development Project. Denpasar.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Hubberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terj. Tjetjep Rohaedi Rohdi. Jakarta: U.I. Press
- Naim, Mochtar. 1983. "Minangkabau Dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara". Dalam A. A. Navis (ed.): Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial Politik. Padang: Genta Singgalang.
- Naisbitt, J. And P. Aburdene. 1990. Megtrends 2000. Sepuluh Arah untuk Tahun 1990an. Jakarta: Binarupa aksara.
- Nasroen, M. 1971. Dasar-dasar Filsafat Adat Minangkabau. Jakarta: Bulan Bintang.
- Navis, A. A. 1984. Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafitipers.
- Pitana, I Gde. 1999. Pelangi Pariwisata Bali. Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Radjab, Mohamad. 1964. Perang Padri di Sumatra Barat (1803-1838) Jakarta: Balai Pustaka
- Refinaldi. 2000. "Konflik Tanah ulayat di Sumatera Barat, Kasus Tanah Perkebunan Tandikat Lama dan Tandikat Baru di Kenagariaian Kepala Hilalang Kabupaten Padang Pariaman," (Tesis), Padang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi, Ilmu Berparadigma Ganda*. Penyadur: Drs. Alimandan. Jakarta: CV Rajawali.
- Rohter. 1992. *A Green Hawaii*. Honolulu: O KaMalo Press
- Roza Dewita, 1996, "Pengaruh Keberadaan Objek Pariwisata Terhadap Pekerjaan dan Pendapatan Masyarakat di Sekitarnya (Kasus Anai Resort dan Golf Course)", Skripsi, Padang: FISIP Unand.
- Schrieke, B.J.O. 1973. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Jakarta: Bhratara.
- Sekretariat Daerah. 2004. *Peluang Investasi di Kabupaten Padang Pariaman, Pariaman: Bagian Perekonomian*.
- Smith, Charlotter. 1987. *Macmillan Dictionary of Anthropology*. London: Macmillan Press Ltd.
- Soelaiman, M. Munandar. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemardjan, Selo. "Perjumpaan kebudayaan dan pariwisata di Bali". Paper Seminar Menyongsong Jubelium Perak Universitas Udayana. Denpasar.
- Soemardjan, Selo. 1997. "Hubungan Pariwisata, Kebudayaan, dan Masyarakat". Dalam I G.N. Bagus (ed.): *M menuju Terbentuknya Ilmu Pariwisata di Indonesia*. Denpasar: Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Sulistya dkk. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Wood, R. E. 1980. "International Tourism and Cultural Change in Southeast Asia." *Economic Development and Cultural Change* 28 (1).
- Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid 1: Asas-Asas*. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Zed, Mestika. 1992. *Perubahan di Minangkabau, Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatera Barat*. Padang: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas.